

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan beberapa argumen utama yang telah dijelaskan pada bab I telah dibuktikan oleh penulis pada bab II dan bab III. Kebijakan yang diterapkan pemerintah Indonesia seperti technical barrier to trade, rules of origin, pre-shipment inspection, dan kerjasama kepabeanan Indonesia-Malaysia telah diterapkan cukup baik.

Dalam upaya meningkatkan daya saing industri tekstil domestik, pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan TBT dan strategi-regulasi standarisasi nasional seperti SNI menjadi kunci utama. Prinsip-prinsip seperti transparansi, tanpa diskriminasi, dan kesesuaian dengan standar internasional adalah landasan yang penting dalam merancang kebijakan ini. Evaluasi rutin dan kaji ulang juga sangat diperlukan untuk memastikan relevansi dan efektivitas regulasi TBT, serta untuk mempertimbangkan dampaknya pada perdagangan internasional dan permintaan pasar. Sebagai negara anggota WTO, Indonesia juga harus memastikan kepatuhan dengan prinsip-prinsip Code of Good Practice WTO yang mendukung pertumbuhan ekonomi global dan nasional.

Rules of origin memegang peranan penting tidak hanya sebagai instrumen kebijakan perdagangan, tetapi juga memiliki dampak yang signifikan pada aliran perdagangan global. Di dalam wilayah perdagangan bebas yang beroperasi di bawah perjanjian preferensial dengan aturan rules of origin kumulatif, kebijakan biasanya lebih longgar daripada wilayah tanpa aturan kumulatif tersebut. Ini

disebabkan oleh kebijakan *rules of origin* kumulatif yang menganggap bahan mentah dan barang dari satu negara anggota dalam wilayah regional sebagai berasal dari negara di mana tahap akhir produksi dilakukan, bukan sebagai impor dari negara lain. Ini berarti, bahan baku dari negara anggota wilayah regional diberi perlakuan istimewa karena dianggap tidak menambah nilai saat tiba di negara yang melakukan tahap akhir produksi. Situasi ini dapat memperkuat perdagangan intra-regional di berbagai jenis barang (baik produk jadi, setengah jadi, maupun bahan baku), mendorong investasi serta transfer teknologi, dan berpotensi memberikan surplus perdagangan bagi negara yang menerapkan kebijakan *rules of origin* kumulatif.

Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan *Pre-Shipment Inspection* (PSI) sebagai strategi untuk meningkatkan daya saing industri tekstil domestik dengan memeriksa produk sebelum dipasarkan, memastikan kualitasnya sesuai standar. PSI membantu mengidentifikasi masalah produk sebelum dikirim, memberikan kesempatan perbaikan, serta meningkatkan reputasi produk domestik di pasar global. Ini berdampak pada peningkatan kepercayaan konsumen, mengurangi risiko produk yang tidak memenuhi standar, dan meningkatkan efisiensi perdagangan internasional.

Keberhasilan Malaysia dengan Patkor Kastima tidak berfokus pada impor pakaian bekas, melainkan pada upaya mereka dalam menangani barang-barang ilegal, khususnya narkoba. Namun, manfaat yang lebih umum dari kerja sama ini adalah peningkatan kolaborasi antara lembaga kepabeanan kedua negara tersebut. Meskipun begitu, secara keseluruhan, upaya kerja sama kepabeanan dan patroli perbatasan antara Indonesia dan Malaysia, seperti yang tercermin dalam Patkor

Kastima, belum terlalu berhasil karena ketidaksesuaian kepentingan nasional terkait impor pakaian bekas. Dalam hal ini, kerja sama ini belum mencapai tingkat optimal karena manfaat yang diperoleh Indonesia dalam mengendalikan impor pakaian bekas masih terbatas. Walaupun ada beberapa efek positif yang dikenali oleh DJBC yang memperpanjang masa kerja sama ini.

#### **4.2 Saran**

Mengacu pada penelitian-penelitian sebelumnya yang memfokuskan pada upaya pencegahan penyelundupan pakaian bekas, penelitian-penelitian tersebut menggunakan sudut pandang bagaimana pemerintah Indonesia yang hanya berfokus dalam hal pertahanan. Pada penelitian ini, penulis telah menjadi orang pertama yang memberikan kontribusi dengan cara memberikan sudut pandang dan sektor yang berbeda. Penulis menerapkan sudut pandang pemerintah Indonesia dalam menggunakan kebijakan NTMs seperti TBT, PSI, dan RoO dalam meningkatkan daya saing industri tekstil domestik agar tidak tergerus dengan penjualan pakaian bekas di dalam negeri. Penulis sadar bahwa adanya beberapa kekurangan pada penelitian ini seperti kekurangan data terkait bentuk penerapan NTMs dari regulasi yang tersedia di Internet. Sebagai saran untuk penulisan penelitian-penelitian selanjutnya yaitu dapat menganalisis penerapan NTMs yang berfokus untuk mencegah penyelundupan pakaian bekas dengan 16 kebijakan NTMs lainnya.